

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

b50aebf41bc31a6ed80662140880192b8d209c6762f26dcaaae2303b41767843

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

PARAPIHAK DALAM PENGEMBANGAN PERSUTERAAN ALAM

Nurhaedah M.

Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Jl.Perintis Kemerdekaan Km.16
Makassar, 90243, telp. (0411)554049, fax. (0411) 554058
e-mail: nurhaedah_muin@yahoo.com

RINGKASAN

Persuteraan alam merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi sektor hulu (budidaya murbei dan ulat sutera) serta sektor hilir (industri dan pemasaran). Dalam pengembangannya persuteraan alam melibatkan parapihak yang terkait baik sektor hulu maupun sektor hilir, lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Namun, keberadaan parapihak sampai saat ini belum banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan usaha ini, sehingga masih diperlukan komunikasi dan koordinasi yang terpadu. Kontribusi parapihak dapat dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kata kunci: Parapihak, peran, pengembangan, persuteraan alam

I. PENDAHULUAN

Persuteraan alam membutuhkan suatu rangkaian kegiatan yang panjang mulai dari budidaya tanaman murbei, budidaya ulat sutera, penanganan pasca panen, industri pengolahan sampai dengan pemasaran. Untuk itu, pengembangan usaha persuteraan alam selama ini melibatkan beberapa lembaga sebagai pembina baik dari lembaga pemerintah maupun non - pemerintah. Masing-masing pihak menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan pembagian sektor kegiatan persuteraan alam yang terbagi atas sektor hulu yang meliputi budidaya murbei, ulat sutera sampai kokon dan sektor hilir meliputi industri dan pemasaran, maka pihak yang terlibat dalam pengembangan persuteraan alam juga terbagi atas sektor hulu dan hilir. Beberapa lembaga hanya berperan pada salah satu sektor apakah hulu atau hilir.

Keberadaan parapihak yang terlibat dalam pengembangan persuteraan alam baik hulu maupun hilir, diharapkan dapat meningkatkan kinerja persuteraan alam baik di daerah maupun

nasional. Keberadaan parapihak dalam pengembangan persuteraan alam merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik. Hingga saat ini, keberadaan para pihak belum banyak berkontribusi dalam peningkatan hasil yang optimal. Untuk itu, dalam mendukung pengembangan tersebut, yang perlu dioptimalkan adalah komunikasi dan koordinasi yang terpadu, sehingga dapat bersinergi dalam mendorong pengembangan usaha persuteraan alam daerah dan nasional.

Salah satu sentra pengembangan sutera alam yaitu Sulawesi Selatan, melibatkan para pihak baik sektor hulu maupun hilir antara lain :

- a. Sektor Hulu : Petani, Balai Persuteraan Alam, Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Perguruan Tinggi, LSM.
- b. Sektor Hilir : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, UPTD, Balai Riset Industri & Perdagangan, Perguruan Tinggi, Kelompok Usaha, PT. Kokon Sutera Sulawesi, LSM, konsumen (pasar).

Peran parapihak dalam urusan persuteraan alam ini sangat dibutuhkan terutama pada fungsi masing-masing agar tercipta suatu sinergi yang mengarah pada tujuan pengembangan sutera di Sulawesi Selatan (Sadapotto, 2004). Selanjutnya Hasnawir *et al.*, (2004) mengemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait dengan persuteraan alam sudah tertata dengan baik hanya pelaksanaan tugas yang belum optimal. Lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan persuteraan alam mengakibatkan permasalahan yang ada tidak sepenuhnya terselesaikan dengan baik.

II. PENGERTIAN PARA PIHAK

Menurut Freeman (1984) dalam Reed *et al.* (2009) Parapihak adalah para pemangku kepentingan atau yang lazim dikenal dengan istilah *stakeholder*. Hobley (1996) dalam Tadjudin (2000) mendefinisikan *stakeholder* sebagai orang atau organisasi yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program-program pembangunan serta orang-orang atau organisasi yang terkena pengaruh (dampak) dari kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Agribisnis Sutera Alam (2012) Parapihak yang terkait dalam pengembangan persuteraan alam antara lain: pemerintah, pelaku usaha, petani, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan

lembaga penelitian dan pengembangan, Masyarakat Persuteraan Alam Indonesia dan *Silk Solution Centre*.

III. BEBERAPA PARAPIHAK PERSUTERAAN ALAM DAN PERANANNYA

Beberapa parapihak sutera alam di tingkat nasional dan peranannya dapat dirinci, sebagai berikut:

A. Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Pemberdayaan ekonomi rakyat yang bergerak di sektor persuteraan alam telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor P.47/MENHUT II/2006. Nomor.29/m-IND/PER/6/2006. Nomor 07/PER/M.KUKM/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Persuteraan Alam Nasional dengan Pendekatan Klaster serta dukungan yang luas dari masyarakat.

Adapun kebijakan pengembangan KUKM yang terkait dengan pengembangan persuteraan alam, antara lain:

1. Pengembangan dukungan administratif dan pengembangan lingkungan yang kondusif. Hal ini dapat dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2. Dukungan non finansial untuk meningkatkan kemampuan KUKM (Koperasi Usaha Kecil Menengah). Dukungan non finansial ini meliputi: pelatihan, konsultasi manajemen, pengembangan teknologi, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pasar.
3. Adanya dukungan finansial atas dasar permintaan dan kelayakan pasar serta orientasi bagi pengembangan kemampuan tumbuh KUKM dalam jangka panjang, sebagaimana yang telah dilakukan pada koperasi industri kerajinan sutera (KIKS) Kabupaten Wajo, KUD Lalabata Kabupaten Soppeng dan Koperasi Sutera Tocemba Kabupaten Enrekang dengan bantuan sarana processing benang sutera.

Untuk pelayanan usaha mikro dan kecil yang bergerak di persuteraan dan belum mampu mengakses perbankan atau belum layak, maka dikembangkan lembaga keuangan mikro dan Unit Simpan Pinjam/Koperasi atau simpan pinjam yang telah terbukti

efektif untuk mengatasi kelangkaan likuiditas sebagai UKM (Dinas Koperasi dan UKM, 2007)

B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Peranan BUMN terhadap Usaha Kecil Menengah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05.MBU/2007 tgl 24 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk:

- Pinjaman untuk biaya modal kerja untuk meningkatkan produksi dan penjualan
- Pinjaman khusus untuk jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan mitra
- Pembinaan /pelatihan

Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dana program bina lingkungan diberikan dalam bentuk:

- Bantuan korban bencana alam
- Bantuan pendidikan/pelatihan
- Bantuan peningkatan kesehatan
- Bantuan pengembangan sarana umum
- Bantuan sarana ibadah
- Bantuan pelestarian alam

Pelaksanaan program berazaskan pembinaan pemberdayaan dan pemerataan disesuaikan dengan sumber dana tersedia yang memenuhi 4 sukses meliputi: sukses penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat (PT. Telkom, 2007.)

C. Perum Perhutani

Perum perhutani sebagai BUMN di sektor kehutanan dengan tugas dan perannya sebagai agen pembangunan ikut berperan aktif dalam pengembangan usaha persuteraan alam. Menurut Yulianto (2008) langkah dan upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas telur

- a. Pada tahun 2008, PPUS Candiroto mulai memproduksi telur F1 jenis BS 09 yang merupakan hasil kerjasama dengan

Puslitbang hutan Bogor dan sudah dilakukan pemeliharaan di PSA Regaloh sebanyak 95 box serta di swasta/ masyarakat sebanyak 8 box.

- b. Mulai tahun 2007 dilakukan sertifikasi telur produk PPUS Candirotto oleh Balai Persuteraan Alam Bili-Bili Sulawesi Selatan.

2. Peningkatan kualitas murbei

- a. Perum Perhutani memiliki jenis-jenis murbei unggulan yang berasal dari berbagai negara maupun jenis lokal, yaitu *Morus cathayana*, *M. Multicaulis*, dan *Morus sp.* Var. Canva.
- b. Bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pemuliaan Benih Tanaman Hutan (P3BTH) Purwobinangun Yogyakarta, sampai saat ini masih melakukan percobaan penanaman berbagai jenis dan varietas murbei yang dihasilkan oleh P3BTH di lokasi PPUS Candirotto. Dalam penelitian ini dilakukan penanaman berbagai jenis dan varietas tanaman murbei untuk melihat kecocokan tumbuh, kandungan nutrisi dan lain-lain yang berguna untuk pengembangan usaha persuteraan alam.
- c. Untuk pengembangan tanaman murbei di Indonesia, Perum perhutani juga turut membantu dalam penyediaan stek tanaman murbei. Penyebaran hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Di wilayah Jawa Tengah, seluruh Kabupaten merupakan wilayah penyebaran stek murbei yang berasal dari Perum Perhutani Unit I.

3. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam pembuatan demplot budidaya yang melibatkan Kelompok Tani sutera alam yang tidak memiliki kebun murbei.
- b. Memberi kesempatan pelatihan dan magang konsumen telur/petani sutera mengenai pemeliharaan kebun murbei, pemeliharaan ulat dengan maksud agar para konsumen dapat membudidayakan ulat sutera dengan baik.
- c. Melakukan pembinaan kepada para pemelihara ulat sutera baik perusahaan swasta, kelompok tani, Pondok Pesantren maupun perseorangan dengan cara mengunjungi lokasi-lokasi konsumen dan memberikan bimbingan teknis, agar dapat memproduksi kokon yang baik dan berkualitas.
- d. Menampung/ membeli kokon dari masyarakat.

4. Pengembangan Pasar

- a. Berdasarkan SK Menhut No.369/Menhut-VIII/2004 maka dimungkinkan membuat outlet penjualan telur F1 PPUS Candioto bekerjasama dengan koperasi-koperasi dan sentra-sentra sutera alam
- b. Menjamin standarisasi produk sutera (benang dan kain) dan menjamin kontinyuitas produksi.
- c. Melakukan promosi produk sutera dan peningkatan pelayanan penjualan yang cepat dan mudah.
- d. Memberikan kemudahan dalam pembelian benang sutera dengan sistem pembayaran bertahap kepada konsumen dengan jaminan Bank Garansi atau Deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menjalinkan kerjasama dengan pengrajin tenun dan batik-batik antara lain: Bunga melati Jepara, Pengrajin Batik Jawa Anggun Pekalongan, pengrajin Bordir Sri Rejeki Kudus, dan Pengrajin Sulam pita Yard silk Yogyakarta.

D. Departemen Perindustrian

Beberapa peran Departemen Perindustrian dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) persuteraan alam antara lain: (Tarigan, 2008).

- Perumusan kebijakan untuk mengembangkan industri sutera nasional
- Fasilitasi kapasitas produksi
- Bantuan mesin peralatan
- Diklat
- Penyediaan informasi teknologi, pasar dan investasi
- Penerapan teknologi tepat guna
- Bantuan tenaga ahli dalam bidang teknis, manajemen dan SDM
- Fasilitasi permodalan
- Penyelenggaraan temu usaha, promosi dalam dan luar negeri
- Studi banding, magang

Basis program pembinaan yang dilakukan adalah:

- Peningkatan teknologi, standarisasi, mutu dan disain produk.
- Peningkatan kompetensi SDM
- Menjamin ketersediaan bahan baku
- Pengembangan kelembagaan bisnis/usaha
- Dukungan pembiayaan

- Peningkatan promosi dan pemasaran, pengembangan dan penyusunan informasi (termasuk website) dan pengembangan jaringan usaha
- Penciptaan iklim usaha yang kondusif

E. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

Balai Besar Karantina Pertanian turut mendukung pengembangan persuteraan alam melalui peredaran telur ulat sutera. Prosedur pemasukan dan peredaran terhadap media pembawa berupa telur ulat sutera dan kokon mengacu pada ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian yaitu:

- Surat ijin pemasukan dari Departemen Kehutanan cq Dirjen RLPS atas nama menteri
- *Certificate of Health, Certificate of Quality, Certificate of Origin* dari negara asal
- Surat keterangan bahwa dalam 3 bulan terakhir, farm asal tidak ada wabah Pebrine dan *Uzy fly* disertai keterangan proses perlakuan pengendalian hama dan penyakit dari farm tersebut.
- Surat keterangan bahwa kemasan yang digunakan telah bebas penyakit (telah difumigasi)

Kundoro (2008) mengemukakan bahwa dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit yang berasal dari media pembawa berupa telur ulat sutera dan kokon, maka dilakukan tindakan karantina sebagai berikut:

- Tindakan karantina dilakukan di tempat instalasi karantina milik pemerintah atau instalasi karantina milik swasta yang bersifat sementara.
- Dikenakan masa karantina selama maksimum 33 hari (satu siklus hidup) untuk *Parent Stock* dan selama 10 hari untuk *Final Stock*, guna perlakuan tindakan karantina antara lain pemeriksaan mikroskopis deteksi protozoa (*Nosema bombycis*)
- Dilakukan pengujian terhadap TUSB (Telur Ulat Sutera Bertunas/setelah *treatment*) terhadap terbawanya hama penyakit.
- Dilakukan fumigasi terhadap kokon untuk membebaskan dari virus, jamur, bakteri dan parasit.

F. Balai Persuteraan Alam

Dalam menunjang pengembangan persuteraan alam nasional. Pada tahun 1984 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

097/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 dibentuklah Balai Persuteraan Alam (BPA) Sulawesi Selatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 664/Kpts-II/2002, Balai Persuteraan Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam, pemeliharaan bibit induk ulat sutera, pengujian mutu, sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi telur ulat sutera serta pengelolaan sistem informasi persuteraan alam (BPA, 2010).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Persuteraan Alam menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan Rencana Pengembangan persuteraan alam
- Pemeliharaan bibit induk ulat sutera
- Pengujian mutu dan penerapan teknologi persuteraan alam
- Pemantauan produksi, peredaran dan distribusi bibit telur ulat sutera
- Pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi lembaga sertifikasi ulat sutera
- Pengelolaan sistem informasi persuteraan alam
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Balai Persuteraan Alam (BPA) Sulawesi Selatan adalah merupakan satu-satunya Balai Persuteraan Alam yang ada di Indonesia. Untuk memperlancar tugas dan fungsi Balai Persuteraan Alam pada daerah pengembangan, ditetapkan pula adanya Sub Balai Persuteraan Alam pada 3 wilayah, yaitu :

- Sub BPA Wilayah Soppeng, dengan daerah kerja meliputi Kabupaten Soppeng, Wajo, Sidrap, Barru dan Bone;
- Sub BPA Wilayah Kabupaten Enrekang, Polmas dan Luwu;
- Sub BPA Wilayah Gowa, meliputi Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng/Bulukumba, Sinjai dan Maros.

Dalam pelaksanaan tugas pada setiap kabupaten tersebut, ditempatkan seorang petugas bimbingan teknis Balai Persuteraan Alam.

G. Lembaga Penelitian

Lembaga penelitian terdiri dari instansi yang bergerak di bidang penelitian dan Perguruan Tinggi. Balai Penelitian Kehutanan sebagai salah satu lembaga penelitian memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, termasuk memasyarakatkan hasil penelitian baik melalui publikasi maupun gelar teknologi. Berbagai penelitian terkait telah dilakukan,

antara lain: penelitian tentang budidaya tanaman murbei, budidaya dan pasca panen ulat sutera serta sosial ekonomi usaha persuteraan alam.

H. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan memberi dukungan pada pengembangan persuteraan alam daerah melalui:

- Bantuan sarana pemeliharaan ulat sutera
- Fasilitasi penyediaan bibit ulat sutera
- Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan sutera
- Fasilitas pembangunan agrowisata sutera alam di Kabupaten Enrekang
- Pengembangan tanaman murbei
- Pendidikan dan pelatihan kelompok tani
- Pembinaan dan bimbingan teknis
- Studi lapang

Selain itu juga terdapat kegiatan pendukung yaitu kerjasama pemprov dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) dalam hal: kebijakan keunggulan lokal, fasilitasi penguatan klaster dan diklat pengembangan (Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, 2010).

IV. PENUTUP

Dalam rangka peningkatan produksi dan kualitas persuteraan alam nasional dan daerah Sulawesi Selatan pada khususnya, maka diperlukan peran dan kerjasama antar parapihak. Masing-masing pihak dapat berperan dalam pengembangan persuteraan alam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah. Meskipun dalam tulisan ini belum sepenuhnya memaparkan parapihak yang terlibat, namun yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan peran parapihak tersebut, sehingga diperlukan koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agribisnis Sutera Alam. 2012. *Kebijakan Pengembangan Persuteraan Alam*. Archive.html. Diakses tgl 22 April 2013.
- Balai Persuteraan Alam. 2010. Balai Persuteraan Alam Sulawesi Selatan.
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PROPINSI/SULSEL/sulsel_1.html. Diakses tanggal 2 September 2010.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. 2007. Peranan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam pengembangan persuteraan alam. Makalah yang disampaikan pada Temu Usaha Sutera di Hotel Mercure, 8 April 2008. (Tidak dipublikasikan).
- Hasnawir, Nurhaedah dan W. Isnaini. 2004. *Kinerja persuteraan alam di Sulawesi Selatan*. Laporan hasil penelitian. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Sulawesi. (Tidak dipublikasikan).
- Kundoro. 2008. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dalam mendukung peredaran telur ulat sutera. Departemen Pertanian. Makalah yang disampaikan pada Temu Usaha Sutera di Hotel Mercure, 8 April 2008. (Tidak dipublikasikan).
- Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. 2010. Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan persuteraan alam di Provinsi Sulawesi Selatan. Makalah yang disampaikan pada rapat koordinasi teknis persuteraan alam di Makassar, 12 Mei 2010 (Tidak dipublikasikan).
- PT. Telkom. 2007. Peranan Badan Usaha Milik Negara terhadap pengembangan UKM. Makalah yang disampaikan pada Temu Usaha Sutera di Hotel Mercure, 8 April 2008. (Tidak dipublikasikan).
- Reed, M.S., Graver, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H., and Stringer L.C. 2009. "Who's in and Why? A typology of stakeholder analysis method of natural resources management. *Journal of Environmental Management*. 90, 1933-1949.

Sadapotto, A. 2004. *Kerjasama dalam pengembangan sutera di Sulawesi Selatan* (Makalah Falsafah Sains). Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Tadjudin, J. 2000. *Manajemen Kolaboratif*. Bogor: Pustaka Latin.

Tarigan. 2008. Peranan Departemen Perindustrian dalam pengembangan IKM sutera alam. Departemen Perindustrian. Makalah yang disampaikan pada Temu Usaha Sutera di Hotel Mercure 8 April 2008. (Tidak dipublikasikan).